

**IMPLEMENTASI PROGRAM TABUNGAN UTSMAN TERHADAP
PEREKONOMIAN UMKM BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI****Ahmad Rizal Fauzan S^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}**^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}ahmadrizalfss@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id**INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

15-05-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

Kata Kunci:Implementasi Kebijakan,
Tabungan Utsman, UMKM,
Ekonomi Kerakyatan**Keywords:**Policy Implementation,
Uthman Savings, UMKM,,
People's Economy**Corresponding Author:**ahmadrizalfss@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Tabungan Utsman berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi dalam mendukung perekonomian pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Program ini merupakan bentuk kebijakan publik berbasis syariah yang memberikan akses pembiayaan tanpa bunga dan agunan kepada pelaku UMKM, dengan dukungan dana dari APBD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan yang berasal dari Pemerintah Kota, PT BPRS Jam Gadang, dan pelaku UMKM. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta perilaku nasabah yang tidak kooperatif. Pemerintah Kota Bukittinggi dan PT BPRS Jam Gadang telah melakukan sejumlah solusi seperti peningkatan kualitas SDM dan perbaikan sistem pengawasan. Program ini dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses modal dan kestabilan ekonomi pelaku UMKM, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi sosialisasi dan pengawasan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Uthman Savings Program based on the Bukittinggi Mayor Regulation in supporting the economy of MSME actors in Bukittinggi City. This program is a form of sharia-based public policy that provides access to financing without interest and collateral to MSME actors, with funding support from the APBD. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation from informants from the City Government, PT BPRS Jam Gadang, and MSME players. In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive methods in Bukittinggi City. The results showed that the implementation of the program was quite effective, but still faced several obstacles such as limited human resources, limited budget, and uncooperative customer behavior. The Bukittinggi City Government and PT BPRS Jam Gadang have made a number of solutions such as improving the quality of human resources and improving the supervision system. This program is considered to have a positive impact on increasing access to capital and economic stability of MSME actors, although it still requires strengthening in terms of socialization and supervision.

DOI:<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1241>

PENDAHULUAN

Bukittinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di provinsi Sumatra Barat dan memiliki luas wilayah sebesar 25,24 km². Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra, dengan pusat pusat perdagangan utamanya yang terletak di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Saat ini, Bukittinggi menjadi kota terpadat di Provinsi Sumatra Barat, dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa/km². Jumlah angkatan kerja di Bukittinggi adalah sebanyak 52.631 orang, dan sekitar 3.845 di antaranya terdaftar sebagai pengangguran. (Wikipedia, 2023).

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menerapkan berbagai strategi, salah satunya adalah pemberian bantuan modal bagi pelaku UMKM. Diluncurkan pada awal tahun 2022, Tabungan Utsman memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku UMKM tanpa memerlukan jaminan. Dana yang dipinjam hanya perlu dikembalikan sesuai nilai pokoknya, sedangkan biaya jasa pinjaman ditanggung pemerintah melalui APBD. Program ini merupakan bagian dari visi ekonomi kerakyatan yang diusung Erman Safar sejak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bukittinggi pada tahun 2020. Setelah terpilih, program tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan BPRS Jam Gadang.

Modal adalah salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pendapatan, meskipun bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan pendapatan tersebut. Sumber modal bagi UMKM dapat berasal dari kredit bank, modal pribadi, kombinasi keduanya, atau sumber kredit informal lainnya. Modal tidak selalu berupa uang, tetapi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Semakin tinggi modal, semakin besar kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan.

Peningkatan pendapatan dapat dicapai dengan mempertimbangkan berbagai strategi, seperti meningkatkan kualitas produk atau layanan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan produk atau layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Strategi lainnya adalah ekspansi pasar, yang dapat dilakukan dengan membuka cabang baru. Selain itu, mengikuti program pemerintah yang

sering menyediakan dukungan dan insentif bagi pelaku UMKM, seperti pelatihan, pendanaan, atau bantuan teknis, dapat membantu meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan bisnis.

Program ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bukittinggi, yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi. Tabungan Utsman memungkinkan masyarakat mendapatkan pinjaman berbasis akad syariah Murabahah, tanpa riba, dengan cicilan harian yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Untuk mendukung UMKM, Pemerintah Kota Bukittinggi menjalin kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang, yang merupakan BUMD. Kerja sama ini melahirkan program Tabungan Utsman, dengan perjanjian kerja sama oleh Pemerintahan Kota Bukittinggi no 188.15/DKUKMdP/III/2022 dan perjanjian kerjasama oleh PT BPRS Jam Gadang no 25/BPRS-JG/UM/0322 yang bertujuan membantu UMKM memperoleh modal, saat penelitian terjadi adanya perbaruan kerja sama dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang, dengan perjanjian kerja sama oleh Pemerintah Kota Bukittinggi no 500.3/304/DKUKM-TK/KUM/IV/2024 dan perjanjian kerjasama oleh PT. BPRS Jam Gadang no 105/BPRS-JG/UM/0424.

Program Tabungan Utsman diharapkan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi, terutama pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dalam Pasal 12 Peraturan Wali Kota tersebut dijelaskan bahwa semua biaya terkait pinjaman melalui Tabungan Utsman akan ditanggung oleh Pemerintah Kota melalui APBD. Nasabah UMKM hanya perlu membayar sesuai nilai pokok pembiayaan, tanpa tambahan biaya seperti agunan, margin, atau administrasi. Biaya-biaya tersebut sepenuhnya ditanggung pemerintah, dan jika ada kelebihan dana dari pembayaran cicilan, kelebihan tersebut akan langsung masuk ke rekening tabungan nasabah. Program ini menunjukkan bahwa Bukittinggi adalah kota yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Keberhasilan Tabungan Utsman tercermin dalam penghargaan yang diraih pada TOP BUMD Awards 2023. Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mendapat penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2023, BPRS Jam Gadang

menerima penghargaan bintang lima, dan Direktur Utamanya, Feri Irawan, mendapatkan penghargaan Top CEO BUMD 2023 (Pratiwi, 2023). Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS), Gusrizal Gazahar, menyatakan bahwa operasional BPRS diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Alamsyah, 2023).

Program Tabungan Utsman dinilai sebagai langkah inovatif yang mampu mengatasi kendala modal yang dihadapi UMKM, seperti ketidakmampuan memberikan jaminan dan membayar bunga. Erman Safar merasa bersyukur atas penghargaan yang diraih program ini, yang diharapkan terus memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan kinerja BPRS Jam Gadang. Diluncurkan pada 23 Maret 2022, Tabungan Utsman kini menjadi salah satu program unggulan Kota Bukittinggi yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan.

Tabel 1. Jumlah UMKM yang menerima subsidi Tabungan Utsman dan Jumlah Dana yang Keluar pada PT BPRS Jam Gadang Bukittinggi Selama 3 Tahun

Jumlah UMKM		
Tahun	yang Menerima Subsidi	Jumlah Dana
2022	1.956	Rp. 14.554.209.200,-
2023	1.624	Rp. 14.819.600.000,-
2024	1.624	Rp. 10.402.700.000,-

Sumber: Data dari instagram @bagian_pemerintah_bkt,2024

Berdasarkan data yang ditampilkan, terlihat bahwa pada tahun 2022 jumlah nasabah yang mendaftar dalam program Tabungan Utsman mencapai 1.956 orang, dengan total dana yang disalurkan oleh PT BPRS Jam Gadang Bukittinggi sebesar Rp14.554.209.200,-. Pada tahun 2023, jumlah nasabah menurun menjadi 1.624 orang, meskipun nominal dana yang dikeluarkan meningkat menjadi Rp14.819.600.000,-. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dalam jumlah nasabah menjadi 1.064 orang, dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp10.402.700.000,-.

Tabungan Utsman memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Kota Bukittinggi. Tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang memadai. Masalah ini sering kali muncul akibat

rendahnya tingkat literasi keuangan dan kurangnya pemahaman tentang produk keuangan yang mendukung pengembangan usaha.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi tabungan utsman, apa saja kendala dalam implementasi tabungan utsman dan solusi dari kendala dari Implementasi Tabungan Utsman Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi. Berdasarkan fenomena diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Program Tabungan Utsman Terhadap Perekonomian UMKM dalam Peraturan Walikota Bukittinggi"**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian menggambarkan, menafsirkan dan menuturkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, mendalam, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan yang berasal dari Pemerintah Kota, PT BPRS Jam Gadang, dan pelaku UMKM. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling, dimana dalam pemilihan informan hanya berdasarkan karakteristik tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Tabungan Utsman dalam Peraturan Walikota Bukittinggi

Implementasi Program Tabungan Utsman melalui PT. BPRS Jam Gadang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan pembiayaan secara tertulis, pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas, Keputusan penerimaan yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan, serta pencairan dana setelah semua syarat terpenuhi. Syarat yang harus dipenuhi mencakup kriteria usaha mikro produktif, bukti domisili daerah, lolos informasi debitur, serta kelengkapan administrasi seperti KTP, KK, pas foto, dan rencana penggunaan dana.



Gambar 1. Poster Tabungan Utsman

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam implementasi Program Tabungan Utsman. Berdasarkan wawancara dengan Staff Dinas Koperasi dan BPRS Jam Gadang, kualitas SDM dinilai sudah memadai untuk menjalankan program, namun kuantitasnya masih kurang, khususnya untuk tugas pengawasan lapangan dan penagihan harian. Kekurangan tenaga kerja ini menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan efektif program tersebut.

Fasilitas fisik dan non-fisik juga menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara, fasilitas di Dinas Koperasi dan BPRS Jam Gadang, seperti kendaraan operasional, gedung, serta perangkat komputer dan ruang tunggu, dinilai cukup memadai. Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah mengalokasikan dana untuk mendukung keberlanjutan program melalui mekanisme APBD.

Secara umum, implementasi Program Tabungan Utsman di Kota Bukittinggi didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas namun masih kurang secara jumlah, serta fasilitas yang dinilai memadai untuk mendukung operasional program. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ke depan, perlu penambahan jumlah tenaga pelaksana di lapangan dan pengelolaan fasilitas yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Kendala dalam Implementasi Implementasi Program Tabungan Utsman dalam Peraturan Walikota Bukittinggi

Dalam implementasi Tabungan Utsman berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi, terutama terkait sumber daya manusia. Meskipun kualitas SDM di Dinas Koperasi dan BPRS Jam Gadang dinilai cukup baik, jumlah tenaga kerja masih kurang, terutama dalam kegiatan penagihan langsung ke nasabah. Selain itu, masalah komunikasi antara atasan dan staf juga terkadang menyebabkan hambatan, meskipun koordinasi antar staff cukup baik untuk meminimalkan kendala tersebut. Kompetensi dan tanggung jawab pelaksana menjadi faktor penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Dari sisi fasilitas, baik Dinas Koperasi maupun BPRS Jam Gadang sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang program Tabungan Utsman. Fasilitas seperti kendaraan operasional, gedung perkantoran, serta peralatan lainnya dinilai cukup mendukung, apalagi banyak pegawai yang juga menggunakan kendaraan pribadi dalam mendukung kelancaran tugas lapangan. Karena program ini merupakan lanjutan dari pemerintahan sebelumnya, sebagian besar kebutuhan fasilitas sudah tersedia dengan baik dan tidak menjadi kendala berarti dalam pelaksanaannya.

Kendala eksternal juga cukup signifikan, khususnya yang berasal dari perilaku masyarakat atau nasabah. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah adanya nasabah yang menunggak pembayaran angsuran, calon nasabah yang tidak jujur dalam pengajuan data usaha, hingga penggunaan KTP luar Bukittinggi oleh pemohon yang tidak memenuhi syarat. Masalah-masalah ini menghambat keberhasilan program karena berdampak langsung pada kelancaran pembayaran cicilan dan akurasi dalam penyaluran dana Tabungan Utsman.

Solusi untuk Mengatasi Kendala

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasi Tabungan Utsman berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperketat seleksi calon nasabah, khususnya dalam hal kepemilikan KTP. Staff BPRS Jam Gadang menyatakan bahwa nasabah yang

memiliki KTP luar Kota Bukittinggi tidak bisa mengikuti program ini, karena Tabungan Utsman memang ditujukan khusus bagi masyarakat yang berdomisili di Bukittinggi.

BPRS Jam Gadang tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program ini sesuai dengan tujuan awalnya. Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi, termasuk dari masyarakat luar daerah, namun pihak pelaksana menegaskan bahwa penerima manfaat harus sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga sasaran program agar benar-benar membantu UMKM lokal Bukittinggi sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan tersebut.

Dalam mengatasi keterbatasan anggaran, langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi dan seleksi ketat terhadap pengajuan pinjaman. Hanya masyarakat yang memenuhi syarat dan dinilai layak yang dapat menerima subsidi pinjaman, sehingga penggunaan dana tetap terkendali dan tujuan program dapat tercapai secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaannya.

PENUTUP

Implementasi Program Tabungan Utsman berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi berjalan melalui tahapan formal seperti pengajuan, verifikasi, keputusan penerimaan, hingga pencairan dana. Program ini memprioritaskan pelaku usaha mikro produktif yang berdomisili di Bukittinggi dan memenuhi kelengkapan administrasi. Dalam pelaksanaannya, kendala internal seperti kekurangan tenaga kerja, terutama untuk penagihan dan pengawasan, serta komunikasi yang kurang optimal antara atasan dan staf, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, fasilitas fisik dan non-fisik yang tersedia, termasuk kendaraan dan gedung operasional, dinilai cukup memadai untuk mendukung jalannya program.

Di sisi lain, kendala eksternal muncul dari masyarakat, seperti tunggakan angsuran, penyalahgunaan data usaha, serta pengajuan oleh pemohon dari luar Bukittinggi yang tidak memenuhi syarat. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah kota dan BPRS Jam Gadang memperketat proses seleksi nasabah dan tetap berkomitmen menjaga ketepatan sasaran program. Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, seleksi ketat juga dilakukan untuk memastikan dana hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang benar-benar layak,

sehingga program tetap berjalan efektif dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Pius, dan Prasetya. (2008). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Arkola.
- Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aji, S. P. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Perekonomian UMKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(1), 45-58.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Ansell, C., & Gash, A. (2020). Kolaborasi dalam kebijakan publik: Kepemimpinan kolektif dan komunikasi multiarah. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 398–401.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik UMKM di Indonesia.
- Bank Indonevsia. (2022). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yongyakarta.
- Denkin, Norman. K. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. UM Jakarta Press, 268.
- Dunn, W. N. (2003). Public Policy Analysis: An Introduction. Elok Wahyuningsih. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ukm Di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(04), 356–363.

- Grindle, Merileve S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Handayani, S. (2021). Kebijakan Perbankan dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(2), 123-134.
- Hardani, dkk (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup
- Indrianto, Nur dan Bambang Supeno, 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
- Irsyad, W., & Zuwardi, Z. (2023). Dampak Program Tabungan Utsman Untuk Membantu Permodalan Pedagang di Kota Bukittinggi (Studi Kasus: PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi). *Innovative: Journal Of Social Scievnce...*, 3, 2373–2383. <http://jinnovative.org/indevx.php/Innovative/article/view/4750%0Ahttp://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/4750/3607>
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Pendekatan teoritis dan praktis*. Press Unisri.
- Parsons, D. W. (1995). *Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis*. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*.
- Pemerintah Kota Bukittinggi. (2023). *Laporan Tahunan Pengembangan UMKM*. Bukittinggi: Dinas Koperasi dan UMKM.
- Rahayu, S. (2020). Peningkatan Literasi Keuangan pada UMKM: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(2), 45-59.
- Rahmawati, D. (2022). Kendala Yang Dihadapi Bank Syariah Indonesia Kcp Panorama Bengkulu Pasca Merger. 9, 356–363.
- Syadiah, L., Wiyani, S., Wharman, W. S., & Setiyawati, N. (2023). *Struktur Organisasi Dan Implementasinya Pada Organisasi Koperasi Mahasiswa*. Article MOB, 1–12. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/b6ahf>
- Syafirah Aulia br Surbakti, Busyra Azheri, W. F. (2024). Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Utsman Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Bukittinggi. *Sibatik Journal*, 3(11), 1279–1290. <http://eprints.walisongo.ac.id/5986/1/COVER.pdf>
- Sugiyono, D. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. In Penerbit Alfabeta.
- Sumarsono. 2004. “Data Primer adalah data dimana diperoleh secara langsung dari objek penelitian”. (2004;69)
- Supriyanto, R. (2022). Peran Tabungan Utsman dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 5(3), 200-215.
- Utami, R. (2023). Literasi Keuangan di Kalangan UMKM: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(1), 30-40.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik*. Intermedia Jakarta.
- Wilson, W. (2020). *Paradigma kebijakan publik dalam pemerintahan: Dikotomi politik dan administrasi*. Library UNESA